

## Konsep Perdamaian dalam Konflik (Analisis Teori Pemikiran Politik Barat dan Islam)

Karmila Damanik <sup>1a(\*)</sup> Junaidi <sup>2b</sup>

<sup>12</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>a</sup>[damanikkarmila8@gmail.com](mailto:damanikkarmila8@gmail.com) <sup>b</sup>[junaidi@uinsu.ac.id](mailto:junaidi@uinsu.ac.id)

(\*) Corresponding Author nomor HP yang dapat dihubungi

**How to Cite:** Karmila Damanik. (2024). Konsep Perdamaian dalam Konflik (Analisis Teori Pemikiran Politik Barat dan Islam). Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora, 8(2), 2020-2027. doi: [10.36526/js.v8i2](https://doi.org/10.36526/js.v8i2).

Received: 05-10-2024

Revised: 20-10-2024

Accepted: 26-10-2024

### Keywords:

pemikiran,  
perdamaian,  
konflik.

### Abstract

Western political thought is often based on principles such as democracy, human rights, and the secular system. The concept of peace in Western political thought is often associated with diplomacy, conflict resolution through negotiations, as well as the recognition of human rights as a universal foundation for peace. This study examines the concept of peace in conflict from the perspective of Western and Islamic political thought. Aristotle focused on the concepts of justice and good forms of government, including monarchy, aristocracy, and democracy. Al-Farabi: Developing the concept of an ideal state oriented towards morality and ethics. He believes that politics must lead to the happiness of the community. Western political thought emphasizes diplomacy, democracy, human rights, free trade, and tolerance as the foundation of peace. Meanwhile, Islamic political thought prioritizes the enforcement of justice, sharia law, and security as the basis for peace, and introduces the concept of jihad as an effort to maintain justice. This study uses a qualitative research method with a literature study approach, analyzing literary sources related to Western and Islamic political thought. The results of the analysis show that despite differences in principle, these two traditions have similarities in values such as tolerance and interreligious dialogue that can contribute to the resolution of global conflicts. By understanding the potential of these common grounds, this research offers a more inclusive and holistic approach in dealing with complex modern world conflicts.

## PENDAHULUAN

Pemikiran politik Barat sering kali didasarkan pada prinsip-prinsip seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan sistem sekuler. Konsep perdamaian dalam pemikiran politik Barat sering terkait dengan diplomasi, penyelesaian konflik melalui negosiasi, serta pengakuan hak asasi manusia sebagai landasan universal untuk perdamaian (Ashri, 2018). Di sisi lain, pemikiran politik dalam Islam sering kali diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan, hukum syariah, dan konsep-konsep seperti jihad dan khalifah. Dalam konteks ini, konsep perdamaian sering kali dipahami sebagai hasil dari penegakan keadilan, kepatuhan terhadap hukum Allah, dan upaya membangun hubungan harmonis antara umat manusia.

Analisis mengenai konsep perdamaian dalam konflik dari perspektif Barat dan Islam menurut Raffi et al. (2021) dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang akar perbedaan, tantangan, dan juga potensi titik temu antara kedua tradisi pemikiran tersebut. Hal ini juga bisa membantu dalam mencari solusi yang inklusif dan berkelanjutan dalam menangani konflik di berbagai belahan dunia yang melibatkan komunitas Barat dan Islam.

Ada beberapa teori pemikiran politik barat di antaranya adalah: Pemikiran klasik: Plato dan Aristoteles: Plato menekankan pentingnya negara ideal yang dipimpin oleh filsuf raja, sedangkan Aristoteles berfokus pada konsep keadilan dan bentuk pemerintahan yang baik, termasuk monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Teori Kontrak Sosial: Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau: Mereka mengembangkan ide bahwa legitimasi pemerintahan berasal dari kontrak sosial antara individu dan negara. Hobbes melihat negara sebagai hasil dari kebutuhan akan keamanan, Locke menekankan hak asasi manusia, dan Rousseau mengedepankan kehendak umum. Liberalisme dan Marxisme: Liberalisme: Menekankan kebebasan individu dan pasar bebas sebagai landasan masyarakat yang adil. Marxisme: Mengkritik kapitalisme dan menekankan perjuangan kelas sebagai pendorong

perubahan sosial. Teori Modern: Pemikiran politik modern sering kali berfokus pada isu-isu seperti hak asasi manusia, demokrasi liberal, dan globalisasi (Francoise, 2017).

Ada beberapa teori Pemikiran Politik Islam di antaranya ada Pemikiran Klasik: Al-Farabi: Mengembangkan konsep negara ideal yang berorientasi pada moralitas dan etika. Ia percaya bahwa politik harus mengarah pada kebahagiaan masyarakat (Pancawati, 2018). Al-Mawardi: Menerapkan teori kontrak sosial dalam konteks Islam, menekankan pentingnya syarat-syarat untuk pemimpin dan hubungan antara negara dengan rakyat dalam bukunya "Al-Ahkam al-Sulthoniyah" (Syam, 2018). Khilafah dan Syariah: Pemikiran politik Islam sering kali berfokus pada konsep khilafah, di mana pemimpin dianggap sebagai wakil Allah di bumi. Ini berbeda dengan konsep kedaulatan rakyat dalam pemikiran Barat (Rusdi & April, 2019).

Revivalisme Islam: Beberapa intelektual Muslim merespons dominasi pemikiran Barat dengan kembali ke sumber-sumber wahyu (revivalisme), berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam konteks modern. Adaptasi terhadap Modernitas: Pemikir Islam modern mencoba untuk menjawab tantangan globalisasi dan sekularisme dengan mengadaptasi prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem politik kontemporer tanpa kehilangan identitas religiusnya (Qomar, 2021). Dapat disimpulkan bahwa Pemikiran politik Barat cenderung lebih sekuler dan individualistik, sementara pemikiran politik Islam menekankan integrasi antara agama dan politik dengan fokus pada nilai-nilai moral dan etika. Meskipun terdapat perbedaan mendasar, interaksi antara kedua tradisi ini telah menghasilkan berbagai adaptasi dan perkembangan baru dalam konteks politik global saat ini.

Konsep perdamaian dalam pemikiran politik Barat menurut Zahra et al. (2023) mencakup beragam aspek yang menekankan pentingnya diplomasi, demokrasi, hak asasi manusia, perdagangan bebas, dan toleransi sebagai fondasi utama untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Pertama-tama, diplomasi dianggap sebagai sarana utama untuk menyelesaikan konflik, dengan dialog, negosiasi, dan kesepakatan internasional menjadi prinsip utama dalam menjaga stabilitas dan mengatasi ketegangan antarnegara. Selain itu, nilai-nilai demokrasi dan pengakuan hak asasi manusia dianggap krusial dalam membangun perdamaian, dengan demokrasi dipandang sebagai mekanisme yang mendorong penyelesaian konflik secara damai dan memastikan partisipasi politik yang inklusif bagi semua warga negara. Selanjutnya, liberalisme politik menekankan pentingnya perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi sebagai faktor yang dapat meredakan konflik, dengan integrasi ekonomi dianggap dapat menciptakan saling ketergantungan yang mendorong negara-negara untuk mempertahankan perdamaian (Djuyandi, 2017). Terakhir, nilai toleransi dan pengakuan terhadap keanekaragaman dianggap sebagai landasan yang mempromosikan inklusi sosial dan politik, sehingga meminimalkan kemungkinan konflik yang timbul dari perbedaan budaya, agama, dan pandangan politik. Dengan demikian, konsep perdamaian dalam pemikiran politik Barat mencerminkan upaya untuk membangun dunia yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis, hak asasi manusia, perdagangan bebas, dan toleransi, dengan harapan menciptakan lingkungan global yang stabil dan harmonis.

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menyentuh tentang konsep perdamaian dalam konteks konflik. Salah satunya adalah dalam Surah Al-Hujurat ayat 9:

وَأَنْ ظَلَمْتُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقاتِلُوا الَّذِي تَبغىٰ حَتَّىٰ تَقضىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya "Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

Penafsiran Ayat ini antara lain sebagai: Mendamaikan Konflik: Ayat ini memerintahkan untuk mendamaikan konflik antara dua golongan mukmin yang berperang. Hal ini menunjukkan pentingnya perdamaian dan keselarasan di antara umat Islam. Perang Melawan Zhalim: Jika salah satu golongan melanggar perjanjian dan berbuat zalim, maka perangilah golongan tersebut hingga mereka kembali kepada perintah Allah. Kedamaian Setelah Perang: Setelah golongan yang melanggar telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Berlakulah adil dalam setiap permasalahan hukum untuk menghindari kekerasan dan meningkatkan keselarasan. Cinta Allah terhadap Orang-Orang Adil: Ayat ini juga menekankan bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil dan berprinsip keadilan dalam setiap tindakan mereka. Dan makna dari surah Al-Hujurat Ayat 9 menekankan pentingnya keselarasan dan keadilan di antara umat Islam. Dengan cara mendamaikan konflik dan berlaku adil, umat Islam dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan keharmonisan di antara mereka. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah

sangat menghargai dan mencintai orang-orang yang berlaku adil dan berprinsip keadilan.

Adapun beberapa pandangan Penafsir yang diantaranya adalah: Tafsir Al-Muyassar: Menekankan pentingnya mendamaikan dua kelompok yang bertikai dengan menyeru mereka kepada hukum Allah dan Sunnah. Jika salah satu menolak, mereka harus diperangi hingga kembali kepada hukum tersebut. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah: Menggarisbawahi bahwa pemimpin harus mengajak kedua kelompok untuk berdamai dan tunduk pada hukum Allah. Keberpihakan kepada keadilan sangat ditekankan, dengan penekanan bahwa Allah mencintai orang-orang yang adil. Tafsir Wajiz: Menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak terjebak dalam konflik dan pentingnya menegakkan keadilan dalam penyelesaian perselisihan. Secara keseluruhan ayat ini menunjukkan pentingnya perdamaian dan keadilan dalam komunitas Muslim.

Konsep perdamaian dalam pemikiran politik Islam mengambil akar dari prinsip-prinsip agama dan hukum syariah. Dalam konteks ini, perdamaian sering diartikan sebagai hasil dari penegakan keadilan sosial, pemeliharaan keamanan, dan penegakan hukum Allah (Abdillah, 2015). Konsep jihad menurut Khufaya et al. (2021) dalam pemikiran politik Islam tidak selalu terkait dengan perang fisik, tetapi sering diinterpretasikan sebagai upaya untuk mempertahankan keadilan dan melindungi umat Islam dari penindasan atau ancaman luar. Selain itu, pemikiran politik Islam juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab dalam memastikan perdamaian dan kestabilan. Selain menjunjung nilai-nilai agama, pemikiran politik Islam juga mengajarkan toleransi dan perdamaian melalui dialog antar umat beragama serta menghormati prinsip-prinsip keanekaragaman budaya. Dengan demikian, konsep perdamaian dalam pemikiran politik Islam mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan harmonis, yang diatur oleh prinsip-prinsip agama dan hukum syariah. Politik dalam ruang lingkup Islam tidak hanya membahas mengenai kekuasaan, namun juga memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya (Singarimbun, 2023). Analisis dan perspektif gabungan antara konsep perdamaian dalam pemikiran politik Barat dan Islam menawarkan wawasan yang mendalam tentang potensi titik temu serta perbedaan yang mendasar antara kedua tradisi pemikiran tersebut (Qomar, 2021). Meskipun muncul dari latar belakang yang berbeda, keduanya memiliki aspek yang dapat saling melengkapi dalam memahami dan menangani konflik, Hal ini terlihat dari bagaimana para pemikir Islam ketika merumuskan pemikiran tentang negara dan pemerintahan yang lebih menonjolkan aspek logika daripada aspek agama, meskipun mereka tetap memasukkan nilai-nilai yang berasal dari ajaran Islam (Putra, 2020).

Sementara pemikiran politik Barat menekankan diplomasi, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai fondasi perdamaian, pemikiran politik Islam menyoroti keadilan sosial, pemeliharaan keamanan, dan penegakan hukum syariah. Namun, ada persamaan dalam nilai-nilai seperti toleransi, dialog antar agama, dan pengakuan terhadap keanekaragaman budaya yang dapat menjadi dasar bagi kerja sama dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan (Aji & Indrawan, 2019).

Dengan memadukan elemen-elemen dari kedua tradisi pemikiran ini, mungkin untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam menangani konflik global, yang mengakui kompleksitas dunia modern yang terdiri dari beragam budaya, agama, dan pandangan politik. Dengan demikian, analisis gabungan ini tidak hanya membantu dalam memahami akar perbedaan antara Barat dan Islam, tetapi juga mengidentifikasi potensi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menciptakan perdamaian di tengah konflik yang kompleks dan beragam di seluruh dunia.

## METODE

Dalam penelitian tentang konsep perdamaian dalam konflik dengan menganalisis teori pemikiran politik Barat dan Islam, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dianggap sebagai pendekatan yang relatif baru dan berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), di mana sebagian besar sumber data berasal dari bahan-bahan pustaka dan referensi yang relevan seperti buku dan artikel berjudul (Assyakurrohman et al., 2022). Penelitian ini dilakukan dengan melakukan telaah pustaka, yaitu mengumpulkan data (informasi) dari berbagai sumber, terutama buku dan artikel jurnal. Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendukung gagasan dan proposisi yang dihasilkan, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan dan saran yang relevan. Tahapan dalam penelitian ini meliputi pemilihan topik yang akan di *review* terlebih dahulu, pencarian dan pemilihan artikel jurnal yang relevan, analisis dan sintesis literatur yang ditemukan, serta organisasi penulisan *review* agar sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep perdamaian dalam konflik dari perspektif politik Barat dan Islam, serta menghasilkan temuan yang bermanfaat untuk

pemahaman dan penyelesaian konflik yang lebih efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### **Konsep Perdamaian Menurut Pemikiran Politik Barat**

Dalam pemikiran politik Barat, konsep perdamaian sering kali dikaitkan dengan teori liberal, yang berpendapat bahwa perdamaian dapat dicapai melalui institusi demokratis dan kerjasama internasional. Immanuel Kant, seorang tokoh utama dalam pemikiran ini, dalam karyanya "Perpetual Peace" berargumen bahwa negara-negara yang menganut sistem liberal cenderung tidak berperang satu sama lain. Menurutnya, perdamaian abadi dapat dicapai melalui kesadaran individu akan pentingnya perdamaian, konstitusi republik, dan perjanjian antarnegara untuk mengakhiri perang.

Kant juga menekankan bahwa negara-negara liberal memiliki kecenderungan untuk bersikap pasifis dalam interaksi internasional mereka. Hal ini diperkuat oleh gagasan Democratic Peace, yang menyatakan bahwa negara-negara demokratis tidak hanya lebih jarang terlibat dalam konflik bersenjata tetapi juga lebih cenderung menyelesaikan perselisihan melalui cara damai seperti negosiasi dan diplomasi. Dalam konteks ini, perdamaian dipahami sebagai kondisi di mana keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi terjamin, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi stabilitas (Nursita & Surwandono, 2017).

#### **Konsep Perdamaian Menurut Politik Islam**

Sementara dalam pemikiran Islam, konsep perdamaian lebih luas dan mendalam, mencakup aspek spiritual dan sosial. Perdamaian dalam konteks Islam tidak hanya berarti ketiadaan konflik atau perang, tetapi juga mencakup keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Islam menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara individu, masyarakat, dan Tuhan sebagai dasar untuk mencapai perdamaian.

Johan Galtung, seorang ahli teori perdamaian, membedakan antara perdamaian negatif (ketiadaan kekerasan) dan perdamaian positif (keberadaan keadilan sosial). Dalam pandangan Galtung, perdamaian positif adalah kondisi di mana semua bentuk penindasan dan ketidakadilan dihilangkan, menciptakan lingkungan yang mendukung dialog dan partisipasi aktif dari semua pihak dalam konteks Islam, nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan solidaritas sosial sangat ditekankan sebagai pilar untuk mencapai perdamaian sejati.

Secara keseluruhan, baik dalam pemikiran politik Barat maupun Islam, perdamaian dilihat sebagai suatu kondisi yang ideal namun memerlukan usaha aktif untuk mencapainya melalui keadilan sosial dan kerjasama antarindividu serta antarnegara (Ma'rief, 2003).

#### **Pengaruh Liberalisme terhadap Pemahaman Perdamaian**

Liberalisme merupakan salah satu perspektif utama dalam studi hubungan internasional yang menawarkan pandangan optimis tentang potensi kerja sama antarnegara untuk mencapai perdamaian. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek penting dari liberalisme yang memengaruhi pemahaman dan pencapaian perdamaian, serta contoh aplikasi dalam konteks global (Rosyidin, 2022).

1. Aspek-aspek penting dalam liberalisme yang memengaruhi perdamaian
  - a) Sifat Dasar Manusia: Liberalisme berasumsi bahwa manusia pada dasarnya bersifat baik dan mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pandangan ini berbeda dengan realisme yang cenderung pesimis dan melihat konflik sebagai bagian tak terhindarkan dari hubungan internasional.
  - b) Kerja Sama Internasional: Liberalisme menekankan pentingnya kerja sama antarnegara sebagai cara untuk mengurangi konflik dan menciptakan perdamaian. Melalui institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara-negara dapat berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah global.
  - c) Interdependensi Ekonomi: Konsep interdependensi menjadi kunci dalam liberalisme, di mana negara-negara saling membutuhkan satu sama lain dalam aspek ekonomi. Ketergantungan ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perang, karena konflik akan merugikan semua pihak yang terlibat.
  - d) Norma dan Aturan Internasional: Liberalisme percaya bahwa perdamaian dapat dicapai melalui institusionalisasi norma-norma liberal dalam politik internasional, yang mendorong kerja sama saling menguntungkan dan penegakan hukum internasional (Badjodah et al., 2021).

2. Contoh aplikasi dalam konteks global
  - a) Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa: Setelah Perang Dunia I, Woodrow Wilson mempelopori pembentukan Liga Bangsa-Bangsa sebagai upaya untuk menciptakan sistem keamanan kolektif yang bertujuan mencegah perang melalui diplomasi dan kerja sama antarnegara.
  - b) Perdagangan Bebas: Inisiatif perdagangan bebas di kawasan Asia-Afrika menunjukkan bagaimana liberalisme dapat diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Kerja sama ekonomi ini membantu negara-negara berkembang untuk saling bergantung satu sama lain, sehingga mengurangi insentif untuk berkonflik.
  - c) Demokrasi sebagai Solusi Perdamaian: Teori perdamaian demokratis menyatakan bahwa negara-negara demokratis cenderung lebih damai satu sama lain. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa negara-negara dengan sistem pemerintahan demokratis lebih mungkin untuk menyelesaikan konflik melalui dialog daripada kekerasan.
  - d) Operasi Pemeliharaan Perdamaian: Keterlibatan PBB dalam operasi pemeliharaan perdamaian di berbagai belahan dunia merupakan contoh konkret dari penerapan prinsip-prinsip liberalisme dalam menjaga stabilitas dan mencegah konflik bersenjata (Almubarak, 2018).

### Perspektif Islam tentang Perdamaian

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm*, dan sebagainya digunakan oleh Al-Qur'an dalam pengertian keadilan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan

1. Prinsip-prinsip dasar Islam terkait perdamaian
  - a) Keadilan dan Harmoni: Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan harmoni dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan merupakan ciri utama dalam ajaran Islam, dan setiap orang Muslim harus memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Keadilan ini meliputi segala aspek kehidupan, dari hubungan antara manusia dengan Tuhan hingga hubungan antarmanusia.
  - b) Tegaknya Keadilan: Keadilan dalam Islam harus ditegakkan secara sempurna pada setiap lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam QS An-Nisaa ayat 58, yang menekankan pentingnya menegakkan hukum dengan adil dan tidak membiarkan kebencian menghalangi keadilan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekuensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis.
  - c) Persamaan Manusia: Islam menekankan persamaan manusia secara sempurna. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk hidup dan mengekspresikan diri secara sempurna sebagai manusia yang memiliki budi, rasa, dan karsa. Persamaan ini menjamin tegaknya keadilan secara maksimal, sehingga siapapun tidak pernah dapat dibedakan di hadapan mahkamah keadilan.
  - d) Jaminan Sosial: Keadilan tidak akan dapat ditegakkan dalam sebuah masyarakat yang secara ekonomi kacau balau. Jaminan sosial yang kuat sangat diperlukan untuk mencegah ketidakadilan dan menciptakan kesejahteraan hidup yang merata (Almubarak, 2018).
2. Konsep keadilan dan harmoni dalam Islam
  - a) Definisi Keadilan: Keadilan dalam Islam meliputi segala aspek kehidupan. Keadilan tidak hanya mencakup satu aspek saja, tetapi semua aspek yang dibangun di atas tiang pokok yaitu hati nurani yang ada dalam diri manusia (*dhamir*) dan pelaksanaan syariat secara menyeluruh di lingkungan masyarakat.
  - b) Bentuk Keadilan: Bentuk keadilan yang harus ditegakkan menurut Islam sangat banyak dan mungkin sulit dibuat batasannya. Namun secara garis besar, keadilan dapat diungkapkan sebagai berikut:
    - 1) Keadilan dalam Hubungan Khaliq dan Makhluq: Alam semesta ini merupakan kesatuan yang sempurna, dan semua yang ada di dalamnya terkait dan berjalan sesuai dengan Sunnatullah.
    - 2) Keadilan terhadap Semua Manusia: Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan antara yang kuat dan yang lemah, kulit putih dan hitam, dan lain-lain (Nurdin, 2017).

### Perbandingan Pendekatan Liberal dan Perspektif Islam

1. Kesamaan dalam tujuan perdamaian  
Meskipun liberalisme dan perspektif Islam memiliki latar belakang dan pendekatan yang berbeda,



keduanya berbagi tujuan yang sama dalam mencapai perdamaian. Berikut beberapa kesamaan:

- a) Pentingnya Keadilan: Kedua pendekatan menekankan pentingnya keadilan dalam menciptakan perdamaian. Keadilan dalam Islam meliputi segala aspek kehidupan, sedangkan liberalisme juga menekankan keadilan sebagai prinsip dasar dalam hubungan internasional.
- b) Harmoni dan Kerukunan: Kedua pendekatan berfokus pada harmoni dan kerukunan. Islam mengajarkan pentingnya dialog antar umat beragama untuk menciptakan kerukunan, sedangkan liberalisme menekankan pentingnya kerja sama antarnegara untuk mengurangi konflik.
- c) Kebijakan Sosial: Kedua pendekatan juga menekankan pentingnya kebijakan sosial yang memastikan kesejahteraan semua anggota masyarakat. Islam memiliki prinsip kebebasan beragama dan menghormati orang lain, sedangkan liberalisme menekankan pentingnya hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial (Nurrohman et al., 2023).

## 2. Perbedaan dalam metode dan implementasi

- a) Fokus Utama: Liberalisme berfokus pada kebebasan individu dan hak asasi manusia, sedangkan Islam memiliki prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu yang dianggap penting dengan syarat bahwa kebebasan individu tidak merugikan kepentingan masyarakat atau menentang ajaran Islam.
- b) Pandangan tentang Agama: Liberalisme sering dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh Islam karena mengutamakan kebebasan individu tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Sementara itu, Islam memiliki aturan dan hukum yang menjadi sekat bagi penganutnya untuk tidak dilanggar.
- c) Metode Penyelesaian Konflik: Liberalisme cenderung menggunakan metode diplomasi dan kerja sama antarnegara untuk menyelesaikan konflik, sedangkan Islam memiliki konsep dialog antar umat beragama yang lebih toleran dan tidak mengorbankan keyakinan.

Implementasi dalam Masyarakat: Implementasi liberalisme dalam masyarakat cenderung lebih individualistik dan mungkin mengabaikan aspek kebersamaan dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, implementasi Islam dalam masyarakat berfokus pada keseimbangan antara profan dan sakral, serta mempertahankan keyakinan tanpa mengorbankan ketentraman dan kesejahteraan yang menjadi kebutuhan bersama (Dewi, 2022).

## Pembahasan

Mengintegrasikan prinsip-prinsip perdamaian dari pemikiran Barat dan Islam dapat membantu dalam mengembangkan pendekatan resolusi konflik yang lebih inklusif. Di satu sisi, prinsip diplomasi dan hak asasi manusia dari pemikiran Barat dapat memperkuat struktur sosial yang demokratis dan mendorong perdamaian melalui stabilitas politik. Di sisi lain, penekanan Islam pada keadilan dan kesejahteraan spiritual dapat memperkuat ikatan sosial dan menciptakan keselarasan yang lebih mendalam dalam masyarakat yang memiliki nilai keagamaan tinggi. Integrasi ini berpotensi menjadi model penyelesaian konflik yang efektif, terutama dalam menghadapi tantangan global yang kompleks dan multikultural (Zahra et al., 2023).

## Implikasi Praktis dalam Resolusi Konflik

Pendekatan yang memadukan nilai-nilai dari kedua tradisi ini dapat diaplikasikan dalam diplomasi global dan program resolusi konflik. Misalnya, kerjasama internasional yang berfokus pada dialog dan menghormati perbedaan agama serta budaya dapat menciptakan perdamaian yang lebih berkelanjutan. Selain itu, upaya untuk menyelaraskan nilai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi akan meningkatkan stabilitas dan mengurangi ketidakadilan yang sering menjadi pemicu konflik. Pendekatan inklusif yang menggabungkan aspek politik Barat dan Islam ini relevan untuk diterapkan dalam konteks diplomasi internasional saat ini. Penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan pandangan dunia adalah kunci dalam membangun perdamaian yang adaptif terhadap perubahan sosial yang terus berkembang. Dengan memahami perbedaan dan titik temu dari kedua perspektif ini, diplomasi global dapat mengadopsi pendekatan yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan.

## PENUTUP

Pengaruh liberalisme terhadap perdamaian berfokus pada potensi kerja sama antarnegara, dengan menekankan sifat manusia yang baik, kerja sama internasional, interdependensi ekonomi, serta norma dan aturan internasional. Contoh aplikasinya termasuk pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, perdagangan bebas, demokrasi, dan operasi pemeliharaan perdamaian oleh PBB. Dalam perspektif Islam, perdamaian dicapai melalui keadilan dan harmoni, dengan

prinsip kesetaraan dan jaminan sosial yang kuat. Meskipun liberalisme dan Islam memiliki tujuan perdamaian yang sama, pendekatan keduanya berbeda dalam aspek keadilan, kebebasan individu, dan penyelesaian konflik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2015). *Islam & Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Gramedia PustakaUtama.
- Aji, M. P., & Indrawan, J. (2019). Memahami Studi Perdamaian sebagai Bagian dari IlmuHubungan Internasional. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 9(3), 65–84.
- Almubarak, F. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(2), 115–143.
- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1– 9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Badjodah, A. F., Husen, M., & Ahmad, S. (2021). Dinamika Konflik dan Upaya KonsensusPalestina-Israel (Studi Kasus Perjanjian Perdamaian Oslo (Oslo Agreement) Tahun 1993). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 409–420.
- Dewi, N. R. Si. (2022). Liberalisme dalam Pemikiran Islam. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(2), 186. <https://doi.org/10.22373/arj.v2i2.12827>
- Djuyandi, Y. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Francoise, J. (2017). Pemikiran Politik Islam Modern: Peran Majelis Ulama Indonesia. *THE 1st UICIHSS (International Conference on Islamic Humanities and Social Sciences)*, 399–412.
- Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 128–147. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>
- Ma'rief, M. I. (2003). *Logika Kritis Filsuf Klasik: Suatu Pedoman untuk Mengetahui Logika Berpikir Kri*. Anak Hebat Indonesia .
- Nurdin, N. (2017). Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 13(1), 121–130. Nurrohman, S. A., Aprilyani, S., Maulana, S. H., & Hamid, W. B. (2023). Islam dan Liberalisme: Perspektif Perbandingan dan Tantangan dalam Konteks Kontemporer. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 1203–1216.
- Nursita, R. D., & Surwandono, S. (2017). Gagasan Democratic Peace dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat. *Journal of Islamic World and Politics*, 1(1), 28–39. <https://doi.org/10.18196/jiwp.1102>
- Pancawati, H. (2018). Pemikiran al-Farabi Tentang Politik dan Negara. *Aqlania*, 9(1), 73. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2063>
- Putra, B. A. (2020). *Studi Konflik dan Perdamaian Internasional*. Deepublish. Qomar, M. (2021). *Moderasi Islam Indonesia*. IRCiSoD.
- Rafi'i, M., Tauvani, A. Y., & Fridiyanto, F. (2021). Pengarusutamaan Dialog Fikih dan Tasawuf: Mencari Titik Temu Revitalisasi Fikih Perdamaian. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 6(1), 1–17.
- Rosyidin, M. (2022). Realisme Versus Liberalisme: Suatu Perbandingan Paradigmatis. *Indonesian Perspective*, 7(2), 134–144.
- Rusdi, R., & April, M. (2019). *Pengantar Ilmu Politik: Dalam Perspektif Barat dan Islam*. PT RajaGrafindo Persada.

- Singarimbun, K. O. (2023). Korelasi Islam dan Politik dalam Pandangan Ahmad Syafi'i Ma'arif (Buya Syafi'i). *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 227–236.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syam, S. (2018). Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 2(2), 485–498.
- Zahra, D. A. P., Santoso, G., Darmanto, A. P., Oktafiani, R., Nuha, F. A., Wulandari, D., & Putri, A. (2023). Generasi Z dalam Perdamaian Dunia untuk Kemanusiaan. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(2), 227–245.